

BAB III

PENGEMBANGAN NUKLIR INDIA DAN IRAN

A. Pengembangan Nuklir India

1. Sejarah Pengembangan Nuklir India

Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan India, para pemimpin India mengumumkan pendekatan etis terhadap kebijakan luar negeri India secara umum, dan isu-isu nuklir pada khususnya. Hal ini mencerminkan pandangan yang dipegang teguh pada isu-isu global yang diadopsi oleh negara yang merasa telah memenangkan kemenangan moral di samping kemandirian politiknya. Pendekatan ini juga mencerminkan rasa takut terhadap senjata pemusnah massal yang baru. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya memprovokasi kemarahan moral, hal tersebut juga memunculkan persepsi politik tertentu bahwa senjata semacam itu adalah cara baru yang dengannya kemerdekaan negara yang diraih dengan susah payah mungkin dapat terancam. Kekhawatiran ini membuat Nehru (Jawaharlal Neru, Perdana Menteri pertama India yang memimpin pada tahun 1946 hingga 1964) menulis, pada tahun 1954, bahwa "ketakutan akan tumbuh dan mencengkeram bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa dan masing-masing akan mencoba dengan panik untuk mendapatkan senjata baru ini atau beberapa perlindungan yang memadai darinya." Nehru mengakui bahwa "faktor yang mendominasi di dunia modern adalah prospek senjata mengerikan ini tiba-tiba mulai digunakan sebelum senjata normal kita benar-benar tidak berguna."¹

Upaya awal India dalam ilmu nuklir dan teknologi telah berkembang sudah sejak awal, bahkan sebelum kemerdekaan India sendiri. Langkah pertama diambil oleh Dr. Homi Jehangir Bhabha pada Maret 1944 ketika ia mengajukan proposal kepada Yayasan Sir Dorab Tata (didirikan untuk menghormati paman Bhabha sendiri, Sir Dorab Tata) untuk mendirikan lembaga penelitian nuklir, lebih dari tiga tahun sebelum kemerdekaan. dan setahun sebelum uji coba senjata nuklir pertama. Hal ini menyebabkan terciptanya *Tata Institute of Fundamental Research* atau Lembaga Penelitian Fundamental Tata (TIFR) pada tanggal 19 Desember 1945 dengan Bhabha sebagai Direktur pertamanya. Pemerintah baru India mengesahkan Undang-undang Energi Atom, pada 15 April 1948, yang mengarah pada pembentukan *Indian Atomic Energy Commission* atau Komisi Energi Atom India (IAEC) tidak cukup satu tahun setelah kemerdekaan. Pada waktu itu Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru menyatakan: " Kita harus mengembangkan energi atom ini terlepas dari perang - memang saya pikir kita harus mengembangkannya untuk tujuan menggunakannya untuk tujuan damai. ... Tentu saja, jika kita dipaksa sebagai bangsa untuk menggunakannya untuk tujuan lain, mungkin tidak ada sentimen saleh dari kita yang akan menghentikan negara itu untuk menggunakannya seperti itu. "²

Catatan ambivalensi dalam pidato Nehru diatas menandakan kebijakannya tentang penelitian nuklir untuk dekade berikutnya. Nehru mengambil peran penting dalam politik internasional, mendirikan Gerakan Non-Blok, dan menganjurkan pelucutan senjata nuklir. Namun, ia menolak untuk menutup opsi nuklir India sementara negara-negara lain mempertahankan persenjataan nuklir dan mendukung program yang dirancang untuk meningkatkan potensi senjata India

¹ Ghose, Arundhati, *Negotiating the CTBT: India's security concerns and nuclear disarmament*, Journal of International Affairs; New York Vol. 51, Iss. 1, Summer 1997, hlm 239-261.

² *India's Nuclear Weapons Program : The Beginning: 1944-1960*, <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html>, diakses 30 Juli 2018.

Bahkan sebelum pembentukan institusi tersebut, orang India memiliki akses ke beberapa jurnal ilmiah Barat, yang kemudian memberi India pemikiran secara teoritis untuk lebih maju menuju senjata nuklir daripada sebagian besar negara berkembang lainnya pada saat itu. Selain memperkaya plutonium dan uranium, komponen unik dari aktivitas nuklir India adalah thorium, karena India memiliki dua puluh lima persen dari deposit thorium dunia. Thorium memang tidak ideal untuk digunakan dalam senjata, tetapi penggunaannya untuk kekuatan sipil bisa membebaskan hampir semua uranium dan plutonium India untuk difokuskan di keperluan militer.³

Pada tahun 1954 program nuklir India mulai bergerak ke arah yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan kemampuan senjata nuklir. Pada 3 Januari 1954 IAEC memutuskan untuk mendirikan fasilitas baru - *Atomic Energy Establishment, Trombay* atau *Pendirian Energi Atom, Trombay (AEET)*, kemudian menjadi "Indian Los Alamos". Pada 3 Agustus 1954, *Department of Atomic Energy* atau *Departemen Energi Atom (DAE)* dibentuk dengan Dr. Bhabha sebagai Sekretaris. Departemen ini menjawab langsung kepada Perdana Menteri dan terus melakukannya hingga hari ini. Program ini tumbuh dengan cepat. Anggaran energi atom meningkat 12 kali lipat dari 1954 hingga 1956. Pada tahun 1958 saja DAE mengonsumsi sepertiga anggaran riset India.⁴ Pada tahun 1955 konstruksi dimulai pada reaktor pertama India, reaktor riset 1 MW Apsara, dengan bantuan Inggris. Dan pada bulan September 1955, setelah lebih dari setahun negosiasi, Kanada setuju untuk memasok India dengan reaktor riset yang kuat - *Canada-India Reactor* atau *Reaktor Kanada-India 40 MW (CIR)*. Di bawah program "Atom untuk Perdamaian" Eisenhower, AS setuju untuk memasok 21 ton air berat untuk reaktor ini pada Februari 1956, dan reaktor itu dijuluki *Canada-India Reactor, U.S* atau *Reaktor Kanada-India, AS* atau *CIRUS* (biasa ditulis sebagai *Cirus*).⁵

Setelah 1974, India terus mengembangkan dan memperbaiki senjata nuklirnya, bereksperimen dengan berbagai jenis desain dan material. India secara resmi memiliki nuklir pada tahun 1998, dengan melakukan lima uji coba nuklir (satu bom fusi, empat bom fisi), sebuah langkah yang disambut dengan persetujuan domestik yang tinggi. Pakistan menanggapi dengan uji coba nuklirnya sendiri, membawa realitas senjata nuklir Asia Selatan ke tempat terbuka.⁶

2. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan India dalam Pengembangan Nuklir India

Di bawah kepemimpinan Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh, Amerika Serikat dan India telah bergerak maju untuk membangun ikatan kemitraan strategis. Pada 18 Juli 2005, AS dan India mengumumkan peluncuran Inisiatif Kerjasama Nuklir Sipil, dimana kedua pemimpin tersebut mengumumkan serangkaian inisiatif yang luas sebagai bagian dari komitmen baru untuk hubungan bilateral yang komprehensif. Di antaranya, Inisiatif Kerjasama Nuklir Sipil yang telah menjadi perhatian terbesar. AS dan India berbagi tiga tujuan dalam melaksanakan inisiatif ini: untuk menghapus perbedaan inti yang menghambat hubungan strategis selama lebih dari 30 tahun, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi India dengan cara yang ramah lingkungan, dan untuk memperkuat rezim nonproliferasi

³ Akhilesh Pillalamarri, *India's Nuclear-Weapons Program: 5 Things You Need to Know*, The National Interest, dalam <https://nationalinterest.org/feature/indias-nuclear-weapons-program-5-things-you-need-know-12697>, diakses pada 29 Juli 2018.

⁴ *India's Nuclear Weapons Program : The Beginning: 1944-1960*, <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html>, diakses 30 Juli 2018.

⁵ *Ibid.*

⁶ Akhilesh Pillalamarri, *India's Nuclear-Weapons Program: 5 Things You Need to Know*, The National Interest, dalam <https://nationalinterest.org/feature/indias-nuclear-weapons-program-5-things-you-need-know-12697>, diakses pada 29 Juli 2018.

global. Pemerintahan Bush, pada tahun 2005, menandatangani perjanjian dengan India untuk memberikan bantuan dalam pengembangan energi nuklir untuk penggunaan sipil. Beberapa analis berpendapat bahwa perjanjian itu akan merusak NPT, yang mana India belum bergabung, dengan memberikan manfaat yang saat ini disediakan untuk pihak-pihak dalam NPT. Kongres AS menyetujui perjanjian tersebut pada akhir 2006.⁷

Di bawah parameter inisiatif ini, India akan memperlihatkan semua fasilitas nuklir sipilnya untuk perlindungan IAEA. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Dewan Gubernur IAEA menyetujui perjanjian perlindungan India, membuka jalan bagi pertimbangan India di *the Nuclear Suppliers Groups (NSG)* atau Kelompok Pemasok Nuklir, suatu grup kontrol ekspor multilateral yang bertujuan untuk mengurangi proliferasi nuklir dengan cara mengontrol ekspor nuklir yang kemungkinan digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir.⁸ AS membuka peluang kepada NSG untuk mengizinkan perdagangan dengan sektor nuklir damai yang berkembang di India. Kesepakatan bersama untuk kerja sama nuklir damai akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika dan India untuk bermitra bersama-sama dengan cara yang akan mendorong pertumbuhan di sektor nuklir sipil India, menciptakan sumber energi bersih yang akan bermanfaat bagi lingkungan, dan akan menawarkan keamanan energi yang lebih besar kepada India dengan sumber-sumber stabil energi untuk ekonomi besar dan berkembang.

Sebagai bagian dari keseluruhan inisiatif, India akan memperluas perlindungan internasional, mematuhi pedoman ekspor nuklir dan rudal internasional, melanjutkan moratorium sukarela pada uji coba nuklir, dan memastikan bahwa semua perdagangan nuklir sipil akan digunakan hanya untuk tujuan damai. Karena India akan menempatkan lebih banyak reaktornya di bawah perlindungan, itu mengurangi infrastruktur nuklir yang tersedia untuk program senjatanya. Komitmen-komitmen ini merupakan keuntungan yang signifikan untuk upaya nonproliferasi global.

Kongres AS pada tanggal 1 Oktober 2008, memberikan persetujuan akhir untuk perjanjian yang memfasilitasi kerjasama nuklir antara Amerika Serikat dan India. Kesepakatan ini dilihat sebagai titik balik dalam hubungan AS-India dan memperkenalkan aspek baru untuk upaya nonproliferasi internasional. Pada bulan Juli 2009, New Delhi menetapkan dua situs untuk perusahaan AS untuk membangun reaktor nuklir di India. Tetapi hukum tanggung jawab nuklir yang disahkan oleh parlemen India pada bulan Agustus 2010 menyebabkan keretakan dengan pemasok nuklir AS. Kritik terhadap undang-undang tersebut berpendapat bahwa usulan India untuk mencari ganti rugi hukum terhadap pemasok nuklir adalah penyimpangan tajam dari rezim tanggung jawab internasional yang memiliki operator nuklir bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan. India juga ingin Amerika Serikat melonggarkan sebagian pembatasannya pada transfer teknologi ke India.⁹

Detail kesepakatan diatas mencakup hal-hal berikut:¹⁰

- India setuju untuk mengizinkan inspektur dari IAEA untuk memiliki akses ke program nuklir sipilnya. Pada Maret 2006, India berjanji untuk menempatkan empat belas dari dua puluh dua reaktor daya di bawah perlindungan IAEA secara permanen. Teresita Schaffer, direktur program Asia Selatan di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, mengatakan hal ini akan mencakup pabrik-pabrik yang dibangun di dalam negeri, yang India belum mau lindungi sebelum sekarang. India telah berjanji bahwa semua reaktor termal dan pemirsa sipil masa depan harus ditempatkan di bawah perlindungan IAEA secara permanen. Namun, perdana

⁷ Victor W. Sidel, Barry S. Levy, *Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition*, American Journal of Public Health, Vol 97, No. 9, September 2007.

⁸ Saira Bano, *India's Nuclear Suppliers Group (NSG) Membership and the Nuclear Non-Proliferation Regime*, Royal Irish Academy, Irish Studies in International Affairs, Vol 25, 2014.

⁹ Bajoria Jayshree, Pan Esther, *The U.S- India Nuclear Deal*, 5 November 2010.

¹⁰ *Ibid.*

menteri India mengatakan New Delhi "mempertahankan satu-satunya hak untuk menentukan reaktor semacam itu sebagai warga sipil." Menurut dia: "Ini berarti bahwa India tidak akan dibatasi dalam cara apapun dalam membangun fasilitas nuklir masa depan, baik sipil atau militer, sesuai dengan persyaratan nasional kita." Fasilitas militer - dan persediaan bahan bakar nuklir yang diproduksi India hingga kini - akan dibebaskan dari inspeksi atau perlindungan.

- India berkomitmen untuk menandatangani Protokol Tambahan (PDF) - yang memungkinkan inspeksi IAEA lebih intrusif dari fasilitas sipilnya.
- India setuju untuk melanjutkan moratorium pengujian senjata nuklir.
- India berkomitmen untuk memperkuat keamanan persenjataan nuklirnya.
- India bekerja untuk menegosiasikan Perjanjian *Cutoff Bahan Fissile* (FMCT) dengan AS melarang produksi bahan fisi untuk keperluan senjata. India setuju untuk mencegah penyebaran pengayaan dan pengolahan ulang teknologi ke negara-negara yang tidak memilikinya dan mendukung upaya nonproliferasi internasional.
- Perusahaan AS akan diizinkan untuk membangun reaktor nuklir di India dan menyediakan bahan bakar nuklir untuk program energi sipilnya. (Sebuah persetujuan oleh Kelompok Pemasok Nuklir yang mencabut larangan di India juga telah membuka jalan bagi negara-negara lain untuk membuat penjualan bahan bakar dan teknologi nuklir ke India.)

Dari kesepakatan tersebut, India akan memenuhi syarat untuk membeli teknologi nuklir penggunaan ganda AS, termasuk bahan dan peralatan yang dapat digunakan untuk memperkaya uranium atau memproses kembali plutonium, yang berpotensi menciptakan bahan untuk bom nuklir. Itu juga akan menerima bahan bakar impor untuk reaktor nuklirnya.

Perjanjian nuklir AS-India dan transformasinya ke dalam kesepakatan nuklir NSG-India diatas melibatkan pembuatan dan pelanggaran aturan internasional. Dengan membebaskan India dari aturan, kesepakatan itu sama dengan penegakan yang tidak selektif. Pada saat yang sama, Amerika Serikat, menekankan perlunya penegakan aturan internasional yang lebih kuat. Negara yang kurang kuat, bersikeras bahwa tawar-menawar yang mendasari rezim nonproliferasi harus ditegakkan secara adil. Bagi banyak orang, keadilan berarti penegakan universal. Dari perspektif ini, pentingnya kesepakatan nuklir dengan India kurang berhubungan dengan India dibandingkan dengan ibukota negara bagian yang membuat dan menegakkan aturan, terutama AS. India mencari apa yang diinginkan para pemimpinnya.¹¹

B. Pengembangan Nuklir Iran

1. Sejarah Pengembangan Nuklir Iran

Sebagian besar pengeksport minyak utama dunia, seperti Iran, adalah negara berkembang. Dengan demikian, negara-negara ini harus menghadapi tantangan ledakan demografi tanpa memiliki banyak alat-alat yang diperlukan, seperti struktur negara yang kuat, ekonomi yang tumbuh dengan cepat, sejumlah besar modal investasi, banyak pengusaha, insinyur dan inventor, dan infrastruktur yang cukup maju. Bahkan, dunia sekarang ini adalah dunia di mana teknologi dan modal berada di negara-negara yang haus energi - mereka yang tidak memiliki cadangan minyak utama mereka sendiri (misalnya, Jerman, Prancis, dan Jepang) atau memiliki sumber-sumber terbaik yang tak pernah padam. (misalnya, AS) - sedangkan pertumbuhan penduduk dan gejolak sosial dan politik berada di negara-negara berkembang

¹¹ Perkovich, George, *Global implications of the U.S.-India deal*, Perkovich, George. *Daedalus*; Boston Vol. 139, Iss. 1, Winter 2010, hlm 20-31,139.

yang merupakan produsen negara minyak utama (seperti Iran, Arab Saudi, Meksiko, Irak, dll.).¹²

Pada saat yang sama, minyak adalah kekayaan nasional Iran yang tidak terbarukan (dan negara pengekspor minyak lainnya). Setelah diproduksi dan diekspor, minyak tidak akan pernah bisa diregenerasi. Iran tidak dapat diharapkan (dan negara-negara pengekspor minyak lainnya) untuk menghabiskan kekayaan nasionalnya yang tidak terbarukan secara serampangan, tanpa menerima produk atau manfaat yang berlangsung lama sebagai balasannya, tetapi ini akan terjadi jika sumber energi Iran tidak terdiversifikasi, dan Iran terus bergantung hampir secara eksklusif pada minyak dan gas untuk segala sesuatu dari satu-satunya sumber energi ke anggaran tahunannya. Kecuali untuk Norwegia, setiap pengekspor minyak utama (termasuk Rusia) sangat bergantung pada pendapatannya dari penjualan minyak, begitu banyak sehingga jika harga minyak terlalu rendah untuk waktu yang lama, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan sosial dan bahkan revolusi di negara-negara tersebut.¹³

Terdapat 60 ladang minyak utama Iran yang sebagian besar sudah tua, dengan sebagian lagi sudah terkuras habis. Dari tahun 1979 hingga 1997 tidak ada investasi besar yang dilakukan untuk industri minyak Iran. Sebuah penelitian pada tahun 1998 menyimpulkan bahwa, dari 60 ladang minyak, 57 di antaranya memerlukan studi teknis utama, perbaikan, peningkatan, dan represi yang akan membutuhkan waktu selama periode 15 tahun, dengan dana sekitar \$40 miliar. Meskipun, sejak tahun 1997, Iran telah cukup berhasil menarik modal asing untuk cadangan minyak dan gas lepas pantai, hal ini masih jauh berada di belakang negara-negara pengekspor minyak lainnya di Timur Tengah dalam hal mengembangkan sumber energi fosilnya. Iran bahkan belum dapat meningkatkan produksinya ke tingkat pra-Revolusi sebesar 5,5 juta barel/hari. Jika Iran tidak dapat meningkatkan fasilitas minyak dan industrinya pada waktu yang tepat, Iran akan kehilangan nilai pasarnya. Meskipun tidak ada keraguan bahwa solusi untuk masalah mendesak dalam peningkatan industri minyak Iran sebagian bersifat politis, kurangnya solusi apa pun akan memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan Iran.¹⁴

Sejak awal 1990-an, konsumsi minyak Iran telah meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, hanya 8% per tahun, dan total konsumsi energinya telah meningkat dari 1,6 kuadriliun Btu (quads) pada tahun 1980 menjadi lebih dari 5,5 quads - peningkatan lebih dari 280%. Jika tren ini berlanjut, Iran akan menjadi importir minyak bersih pada tahun 2010, bencana besar bagi sebuah negara yang bergantung pada minyak pada 80% dari mata uang asingnya dan 45% dari total anggaran tahunannya. Jika itu terjadi, Iran akan kesulitan memberi makan penduduknya, yang diperkirakan akan mencapai populasi 100 juta orang pada tahun 2025, dan juga mempersiapkan dana untuk pembangunan dan keamanan nasionalnya. Faktanya adalah bahwa, meskipun banyak upaya selama 30 tahun terakhir, output industri Iran, selain dari industri minyaknya, menyumbang hanya 15% dari produk domestik bruto.¹⁵ Oleh karena itu Iran membutuhkan energi alternatif sebagai cadangan lainnya.

Pada tanggal 9 Februari 2003, program dan usaha Iran untuk membangun fasilitas canggih di Natanz dan beberapa kota lain untuk menghasilkan uranium terungkap. Presiden Mohammad Khatami mengumumkan keberadaan fasilitas Natanz (dan fasilitas lainnya) di televisi Iran dan mengundang IAEA untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian, pada akhir Februari, Dr. Mohammad El Baradei, kepala IAEA, ditemani oleh tim inspektur,

¹² Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program, Part I: Its History", Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

¹³ Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program, Part I: Its History", Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

¹⁴ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part II: Are Nuclear Reactors Necessary?*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

¹⁵ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

mengunjungi Iran. Sejak itu, para ahli dan inspektur IAEA telah mengunjungi Iran beberapa kali. Sebuah laporan awal diterbitkan pada bulan Juli, dengan laporan tindak lanjut pada 26 Agustus. Pada tanggal 12 September 2003, IAEA memberi Iran ultimatum untuk mengungkapkan semua rincian kegiatan nuklirnya pada 31 Oktober 2003.¹⁶ Oleh karena itu Iran membutuhkan energi alternatif cadangan lainnya.

Menurut dokumen-dokumen rahasia Pemerintah AS yang diumumkan secara rahasia yang disiarkan di Arsip Keamanan Nasional Digital (ada dalam artikel, "Sengketa Nuklir AS-Iran: Misi Mohamed El Baradei Dimungkinkan untuk Iran," oleh Drs. A. Etemad dan N. Meshkati, diterbitkan pada 13 Juli 2003, di *Iran News*), pada pertengahan 1970-an, AS mendorong Iran untuk memperluas basis energi non-minyaknya, menyarankan kepada Shah bahwa Iran tidak membutuhkan satu tetapi beberapa reaktor nuklir untuk mendapatkan kapasitas listrik yang telah diusulkan *Stanford Research Institute* dan menyatakan minatnya pada perusahaan-perusahaan AS yang berpartisipasi dalam proyek-proyek energi nuklir Iran.¹⁷

Program nuklir Iran dan kegiatan pendukungnya, meskipun telah dibicarakan selama bertahun-tahun, telah menjadi fokus yang tajam sejak pengumuman pada bulan Februari 2003. Informasi dan data yang telah diperoleh oleh IAEA, setelah mengunjungi fasilitas Natanz dan beberapa lokasi lain, telah mengejutkan AS, Uni Eropa, Rusia, dan Jepang. Mirip dengan pemerintahan Clinton, pemerintahan Bush telah curiga terhadap program nuklir Iran, dengan alasan bahwa, memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar, Iran hampir tidak membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Bush berpendapat bahwa tujuan utama program nuklir Iran adalah untuk mengembangkan senjata nuklir. Uni Eropa, yang bernegosiasi dengan perjanjian ekonomi dan budaya Iran; Rusia, yang sedang menyelesaikan pembangunan reaktor nuklir di Bushehr dan berharap untuk membangun lebih banyak reaktor di Iran, dan Jepang, yang berharap untuk menandatangani perjanjian minyak yang menguntungkan dengan Iran untuk mengembangkan ladang minyak Azaadegan Iran yang sangat besar (ladang minyak terbesar di Tengah Timur), semuanya telah menekan keras Iran, menuntut agar Iran mengungkapkan semua rincian rahasia program dan fasilitas nuklirnya.¹⁸

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah pertumbuhan populasi dan dinamika sosial masyarakat Iran. Sejak Revolusi Islam tahun 1979, populasi Iran telah bertambah pesat lebih dari dua kali lipat, dari 32 juta jiwa menjadi 70 juta jiwa, sedangkan produksi minyaknya hanya mampu mencapai 70% jika dibandingkan dengan produksi pada masa sebelum terjadinya Revolusi Islam 1979. Kondisi demikian terjadi karena dari tahun 1979 sampai dengan 1997 tidak ada investasi berarti yang masuk ke Iran, terutama industri minyaknya. Sanksi unilateral Amerika Serikat dan pembatasan kegiatan ekonomi menjadi penyebab. Iran memiliki 60 ladang minyak yang hampir seluruhnya tua, 57 diantaranya bahkan sudah tidak mampu beroperasi dalam kapasitas penuh, membutuhkan perbaikan, dan peningkatan secara teknis.¹⁹

Perbaikan dan peningkatan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit dan meskipun sejak tahun 1997 Iran telah berhasil untuk menarik beberapa investor untuk mengolah sumber daya minyak dan gas melalui beberapa pengeboran lepas pantai, namun upaya ini masih jauh ketinggalan apabila dibandingkan dengan negara-negara pengeksport minyak lainnya di wilayah Timur Tengah. Disamping itu, Iran masih membutuhkan minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih berpotensi mendatangkan keuntungan seperti ekspor yang dapat mendatangkan devisa, atau konversi untuk memenuhi kebutuhan petrokimia

¹⁶ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

¹⁷ Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program, Part II: Are Nuclear Reactors Necessary?", Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*.

(*petrochemicals*). Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka dikhawatirkan Iran akan kehilangan posisi dalam pasar minyak dunia.²⁰

Menurut perjanjian perlindungan IAEA yang asli, Iran tidak harus menyatakan dimulainya pembangunan fasilitas Natanz. Perjanjian ini menetapkan bahwa, hanya dalam 180 hari sebelum memperkenalkan bahan nuklir apa pun, kemudian Iran harus menyatakan keberadaan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas Natanz yang tidak dideklarasikan BUKAN ilegal. Selain itu, Non-proliferasi Senjata Nuklir (NPT) memungkinkan Iran untuk secara hukum membangun fasilitas nuklir, termasuk untuk pengayaan uranium, selama itu dimaksudkan untuk tujuan damai. Selain itu, NPT memungkinkan negara-negara anggota untuk mengundurkan diri dari perjanjian, dengan memberikan pemberitahuan 90 hari kepada IAEA, jika mereka yakin bahwa mematuhi ketentuan NPT mengancam keamanan nasional mereka (dalam bahasa NPT, jika ada di "*Supreme Interest*" mereka.)²¹

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2005 menyampaikan pidato pembukaan pada sidang Majelis Umum PBB di New York menegaskan bahwa selama hanya negara-negara kuat yang tertentu yang bisa mengontrol penuh sumber daya energi dan teknologi nuklir, mereka akan mengabaikan akses bagi negara-negara lain sehingga akan menimbulkan *gap* antara negara kuat dan masyarakat internasional.²² Ahmadinejad memastikan bahwa Iran tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir, inti dari kebijakan nuklir Iran adalah terus melakukan interaksi Iran memang sudah menyiapkan rincian pendekatan nuklir dan berkerjasama baik secara hukum maupun secara teknis dengan IAEA.²³

2. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Iran dalam Pengembangan Nuklir Iran

Diasumsikan pada tahun 1955, diskusi pertama tentang pengembangan program nuklir untuk Iran dilangsungkan. Langkah konkrit pertama, diambil pada tahun 1957 ketika AS menandatangani perjanjian dengan Iran mengenai kerja sama nuklir sipil. Perjanjian ini merupakan bagian dari *Program Atoms for Peace* yang seharusnya memberikan bantuan teknis kepada para penandatangan (diantara para penerima program ini adalah Israel, India, dan Pakistan)²⁴, serta menyewakan kepada mereka uranium yang diperkaya, dan melakukan penelitian bersama tentang penggunaan damai energi nuklir. Pada tahun yang sama, *Central Treaty Organization* (CENTO), yang beranggotakan negara-negara seperti Iran, Pakistan, Turki, Irak, Inggris, dan AS memindahkan Institut Ilmu Nuklirnya dari Baghdad ke Teheran

²⁰ Dafna Linzer, *Past Arguments Don't Square with Current Iran Policy*, Washington Post, 27 Maret 2005, Diakses 31 Juli 2018.

²¹ Mohammad Sahimi, "*Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*", Payvand's Iran News, Diakses dari www.payvand.com, 30 Juli 2018.

²² Rakaryan Sukarjaputra, *Iran Bela Program Nuklir*, (Kompas, 19 Agustus, 2005), Diakses 1 Agustus 2018.

²³ *Ibid.*

²⁴ Steve Inskepe, *Born In The USA: How America Created Iran's Nuclear Program*, diakses dari <http://www.npr.org/sections/parallels/2015/09/18/440567960/born-in-the-u-s-a-how-america-created-irans-nuclear-program>, diakses 22 Juli 2018.

(setelah kudeta militer Jenderal Abdolkarim Ghassem di 1958, Iran menarik diri dari CENTO).²⁵

Pada tahun 1967, di bawah program *Atoms for Peace* tersebut yang diluncurkan oleh Presiden Eisenhower, AS menjual kepada Shah Iran Pahlavi, dari pemerintah Iran, sebuah reaktor riset air ringan berkekuatan 5 megawatt. Struktur berbentuk kubah kecil ini, yang terletak di pinggiran Teheran, adalah awal fondasi program nuklir Iran. Struktur tersebut tetap menjadi pusat kontroversi atas niat Iran terhadap pengembangan nuklirnya, bahkan hingga saat ini. Hal itu dikarenakan Iran mengatakan perlu lebih banyak bahan bakar untuk reaktor, yang bersikeras menggunakannya hanya untuk penelitian dasar, dan untuk menghasilkan isotop medis.²⁶ AS membangun reaktor nuklir itu pada tahun 1967 di kampus Universitas Teheran dan dioperasikan oleh AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*). AS juga menyediakan Iran dengan bahan bakar untuk reaktor tersebut - senjata yang diperkaya uranium.²⁷

Shah Reza Pahlavi adalah sekutu AS. Namun demikian, AS memiliki keraguan tentang memberinya teknologi nuklir. Kekhawatiran itu sangat mirip dengan yang terjadi pada saat ini: para pejabat berpikir mungkin bahwa Iran akan membangun program tenaga nuklir untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir. Sebuah memorandum Departemen Pertahanan 1974, dideklasifikasi dan diposting *online* oleh Arsip Keamanan Nasional, mencatat bahwa stabilitas di Iran sangat bergantung pada kepribadian Shah. Jika dia jatuh, "pembangkang domestik atau teroris asing mungkin dengan mudah dapat merebut bahan nuklir khusus yang disimpan di Iran untuk digunakan dalam bom".²⁸

Iran menandatangani NPT pada 1 Juli 1968. Setelah Perjanjian itu diratifikasi oleh Majelis, perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970. Dalam Pasal IV dari Perjanjian, NPT mengakui atas "hak mutlak untuk mengembangkan penelitian," produksi dan penggunaan energi nuklir untuk proposal damai tanpa diskriminasi, dan memperoleh peralatan, bahan, serta informasi ilmiah dan teknologi." Iran. Peristiwa awal 1970-an, bagaimanapun, berperan dalam membentuk dan mempercepat pengembangan program nuklir Iran. Perang tahun 1973 antara negara-negara Arab dan Israel, dan peningkatan besar dalam harga minyak, memberikan pemerintah Shah sumber daya yang cukup besar untuk pembangunan Iran. Pada saat itu, sebuah studi oleh *Stanford Research Institute* yang berpengaruh menyimpulkan bahwa Iran akan membutuhkan, pada tahun 1990, kapasitas listrik sekitar 20.000-megawatt.²⁹

Dijelaskan oleh studi *Stanford Research Institute* bahwa, Iran berencana untuk mendapatkan hingga 20 reaktor nuklir besar dalam beberapa dekade mendatang. Reaktor-reaktor ini mungkin dapat menghasilkan sejumlah besar bahan yang dapat dikonversi untuk penggunaan bom. "Penerus agresif Shah mungkin menganggap senjata nuklir sebagai barang terakhir yang diperlukan untuk menetapkan dominasi militer Iran secara lengkap di wilayah itu." Pada tahun 1978, Presiden Carter dan Shah mencapai kesepakatan yang akan mengirim

²⁵ Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Energy Program. Part V: From the United States Offering Iran Uranium Enrichment Technology to Suggestions for Creating Catastrophic Industrial Failure", Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, diakses pada 21 Januari 2018.

²⁶ Grier, Peter, *It Was Uncle Sam Who First Who First Give Iran Nuclear Equipment*, diakses dari <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html>, diakses pada 30 Juli 2018.

²⁷ Steve Inskepe, *Born In The USA: How America Created Iran's Nuclear Program*, diakses dari <http://www.npr.org/sections/parallels/2015/09/18/440567960/born-in-the-u-s-a-how-america-created-irans-nuclear-program>, diakses 22 Juli 2018.

²⁸ Grier, Peter, *It Was Uncle Sam Who First Who First Give Iran Nuclear Equipment*, diakses dari <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html>, diakses pada 30 Juli 2018.

²⁹ Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program, Part I: Its History", Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

delapan reaktor air ringan buatan AS ke Iran, sambil menunggu persetujuan Kongres. Setahun kemudian, revolusi Iran memaksa Shah dari kekuasaan dan kesepakatan itu berantakan.³⁰

Dalam NPT, negara memiliki 'hak yang tak dapat dicabut untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi'. Pemerintah Iran telah menggunakan hal ini untuk membenarkan upayanya dalam mengembangkan energi nuklir, dengan alasan bahwa cadangan minyak dan gasnya belum tentu cukup dan alternatif lain perlu ditemukan untuk menjamin keamanan energi untuk masa depan Iran. Namun, AS dan negara yang lain khawatir bahwa Iran berusaha mengembangkan lebih dari sekedar program energi damai, dan bahwa ini adalah tahap pertama dalam ambisi Iran untuk membangun program senjata nuklir. Akibatnya, AS, dengan dukungan dari beberapa komunitas internasional, telah menerapkan sanksi sejak 2006, sesuatu yang oleh Iran dianggap sebagai rencana Anglo-Amerika untuk merusak pembangunan ekonomi Iran.

Jika Iran berusaha mengembangkan senjata, kemungkinan besar pengembangan tersebut akan menjadi respons terhadap sebuah jumlah masalah keamanan yang absolut: Israel, musuh setia Iran, sudah memiliki senjata nuklir; Syiah Iran memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan sejumlah negara dominasi Sunni di Timur Tengah; Turki, di utara, adalah anggota NATO, sekutu AS, dan memiliki hubungan politik dan ekonomi dengan Israel; dan ke timur adalah Sunni Pakistan, negara nuklir lain. Selanjutnya, Iran telah lama menganggap dirinya sebagai target AS. Pada tahun 1953, *Central Intelligence Agency* (CIA) merancang kudeta di Iran, memasang Shah yang condong ke Barat, yang tetap berkuasa hingga Revolusi Islam 1979. Banyak orang Iran ingat bagaimana rezim brutalnya didukung oleh AS, dan masih ada kekhawatiran bahwa AS mungkin mencari perubahan rezim lebih lanjut lagi, seperti yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2001, Irak pada tahun 2003 dan Libya pada tahun 2011. Oleh karena itu mengembangkan senjata nuklir, adalah sebuah tindakan pencegahan.³¹

C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir India

India, yang belum menandatangani *Nuclear Nonproliferation Treaty* (NPT) dan tidak memiliki perlindungan Badan Energi Atom Internasional pada semua bahan nuklir dalam kegiatan nuklir damai, meledakkan perangkat nuklir "damai" pada tahun 1974, meyakinkan dunia akan perlunya pembatasan yang lebih luas tentang perdagangan nuklir. AS menciptakan NSG sebagai tanggapan langsung terhadap uji coba India, menghentikan ekspor nuklir ke India beberapa tahun kemudian, dan bekerja untuk meyakinkan negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. India kemudian menguji senjata nuklir lagi pada tahun 1998.³² Telah diketahui bahwa sebelumnya AS telah secara aktif mempromosikan kerja sama energi nuklir dengan India sejak pertengahan 1950-an, dengan membangun reaktor tenaga nuklir (Tarapur), menyediakan *heavy water* untuk reaktor riset CIRUS, dan memungkinkan para ilmuwan India untuk belajar di laboratorium nuklir AS. Meskipun India aktif dalam perundingan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir 1968 (NPT), India menolak untuk bergabung dengan NPT dengan alasan bahwa itu bersifat diskriminatif. Uji coba nuklir "damai" pada 1974 menunjukkan bahwa teknologi nuklir yang ditransfer untuk tujuan damai dapat digunakan untuk menghasilkan nuklir.³³

³⁰ Peter Grier, *It Was Uncle Sam Who First Who First Give Iran Nuclear Equipment*, diakses dari <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html>, diakses pada 30 Juli 2018.

³¹ Hough et al, *International Security Studies, Theory and Practice*, Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, 2015.

³² Squassoni, Sharon, *U.S. Nuclear Cooperation With India: Issues for Congress*, Congressional Research Service, The Library of Congress.

³³ *Ibid.*

Di AS, Kongres merespons hal ini dengan melewati *Nonproliferation Nuclear Act of 1978* (NNPA, P.L. 95-242), yang memberlakukan persyaratan baru yang keras pada ekspor nuklir AS untuk negara non-senjata nuklir - pengamanan lingkup penuh dan penghentian ekspor jika negara tersebut meledakkan perangkat peledak nuklir atau terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan perolehan atau pembuatan senjata nuklir, di antara hal-hal yang lainnya. Secara internasional, Amerika Serikat menciptakan NSG pada tahun 1975 untuk menerapkan kontrol ekspor nuklir. NSG menerbitkan pedoman pada tahun 1978 "untuk berlaku untuk transfer nuklir untuk tujuan damai dan membantu memastikan bahwa transfer tersebut tidak akan dialihkan ke siklus bahan bakar nuklir yang tidak dijaga atau kegiatan peledak nuklir."³⁴

Mengondisikan ekspor nuklir AS pada negara-negara non-senjata-nuklir yang memiliki perlindungan kerangka penuh menciptakan masalah terutama untuk reaktor India di Tarapur, yang dibangun oleh perusahaan AS dan memiliki bahan bakar uranium yang diperkaya rendah AS, berdasarkan perjanjian kerjasama nuklir tahun 1963. Setelah melewati NNPA, Administrasi Carter mengeksport pengiriman dua uranium lagi di bawah perintah eksekutif dari Komisi Pengaturan Nuklir (NRC/*Nuclear Regulatory Commission*) menolak untuk menyetujui lisensi ekspor pada kondisi nonproliferasi. Meskipun *House* memilih untuk tidak menyetujui keputusan Presiden, Senat memilih 46 hingga 48 pada resolusi ketidaksetujuan. Setelah tahun 1980, semua ekspor nuklir dari Amerika Serikat ke India terputus di bawah ketentuan NNPA.³⁵

Kerjasama nuklir AS diatur oleh Undang-Undang Energi Atom (AEA/*Atomic Energy Act*), yang akan meminta pembebasan dan penentuan tertentu dari Presiden sebelum kerjasama nuklir dengan negara seperti India dapat dilanjutkan. Administrasi mengusulkan undang-undang itu, di samping memberikan keringanan ketentuan relevan dari AEA (Bagian 123 a. (2), 128, dan 129), akan memungkinkan perjanjian untuk berlaku tanpa suara dari Kongres, seolah-olah itu sesuai dengan persyaratan AEA.³⁶ Pemerintahan Bush telah mempertimbangkan kemitraan strategis dengan India sejak tahun 2001. Para pejabat India mengidentifikasi kebutuhan energi mereka yang terus bertambah sebagai wilayah kerja sama, khususnya dalam energi nuklir. 2004 AS-India Langkah Berikutnya dalam inisiatif Kemitraan Strategis (NSSP/*Next Steps in Strategic Partnership*) termasuk kerjasama yang diperluas dalam teknologi nuklir sipil sebagai salah satu dari tiga tujuan. Tahap I NSSP, selesai pada September 2004, diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran proliferasi dan memastikan kepatuhan pada kontrol ekspor AS.³⁷

Pada 18 Juli 2005, Presiden Bush mengumumkan bahwa dia akan "bekerja untuk mencapai kerjasama energi nuklir sipil penuh dengan India" dan akan "juga mencari persetujuan dari Kongres untuk menyesuaikan hukum dan kebijakan AS," dalam konteks kemitraan global yang lebih luas dengan India untuk mempromosikan stabilitas, demokrasi, kemakmuran dan perdamaian. Para pejabat pemerintah telah mempromosikan kerja sama nuklir dengan India sebagai cara untuk mengurangi emisi karbon dioksida India dan ketergantungannya pada minyak, membawa India ke dalam "arus utama nonproliferasi" dan membuka lapangan pekerjaan untuk industri AS.³⁸

Kemudian pada tanggal 9 Maret 2006, Administrasi menyerahkan undang-undang yang diusulkan kepada Perwakilan Hyde dan Senator Lugar. Pada 16 Maret 2006, Perwakilan Hyde dan Lantos mengajukan H.R. 4974, dan Senator Lugar memperkenalkan S. 2429. Komite Hubungan Internasional dari *House* dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengadakan dengar pendapat umum tentang kerja sama nuklir AS dengan India pada bulan April dan Mei. Pada akhir Juni, Komite Hubungan Internasional *House* dan Komite Hubungan Luar Negeri

³⁴ Squassoni, Sharon, *U.S. Nuclear Cooperation With India: Issues for Congress*, Congressional Research Service, The Library of Congress.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid.*

Senat melaporkan versi undang-undang mereka (H.R. 5682 dan S. 3709) untuk menciptakan pengecualian bagi India dari ketentuan Undang-undang Energi Atom yang relevan. Kedua RUU tersebut memberikan keringanan yang diperlukan dengan modifikasi kecil, mempertahankan persyaratan untuk resolusi bersama Kongres untuk perjanjian seperti itu untuk berlaku dan mengandung beberapa pembatasan. House meloloskan H.R. 5682 pada 26 Juli 2006 dengan suara 359 ke 68 dan Senat meloloskan versinya dari H.R. 5682, menggantikan teks yang diubah S. 3709, pada 16 November 2006 dengan suara 85 hingga 12.

Versi Senat dari RUU itu akan melarang kerjasama dalam teknologi nuklir yang sensitif, dengan pengecualian yang sempit dan membutuhkan penggunaan akhir pemantauan ekspor AS, dan berisi penerapan undang-undang untuk AS dalam *Additional Protocol in Title II*. Versi Senat juga memiliki persyaratan bahwa Presiden menentukan, sebelum dia dapat mengeksekusi otoritas pembebasannya, bahwa India sepenuhnya dan secara aktif mendukung upaya AS dan internasional untuk menghalangi, memberi sanksi dan berisi program nuklir Iran, konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua RUU tersebut tercantum di dalamnya persyaratan pelaporan yang signifikan.³⁹ Pernyataan Bersama mencatat bahwa AS “akan bekerja dengan teman dan sekutu untuk menyesuaikan rezim internasional untuk memungkinkan kerjasama dan perdagangan energi nuklir sipil penuh dengan India, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertimbangan bahan bakar yang cepat untuk persediaan reaktor nuklir yang dilindungi di Tarapur.” Amerika Serikat berkomitmen untuk mendorong mitranya untuk mempertimbangkan permintaan ini - pembalikan posisi AS, yang telah melarang bahan bakar ke Tarapur - dan untuk berkonsultasi dengan mitra-mitranya tentang partisipasi India di ITER (kolaborasi pada penelitian fusi) dan dalam Forum Internasional Generasi IV untuk desain reaktor masa depan.⁴⁰

Hubungan bilateral India-AS telah berkembang menjadi kemitraan strategis global, berdasarkan pada peningkatan konvergensi kepentingan pada isu-isu bilateral, regional dan global. Kunjungan Negara Perdana Menteri Dr. Manmohan Singh ke Washington D.C. dari 22-26 November, 2009 sebagai Tamu Negara pertama Presiden Barack Obama menegaskan kembali kemitraan strategis global antara India dan AS. Kunjungan Presiden Obama ke India dari 6-9 November 2010, memberikan momentum lebih lanjut untuk kerja sama bilateral dan membantu membangun kerangka jangka panjang untuk kemitraan strategis global India-AS. Presiden Obama dicirikan India-AS. hubungan sebagai salah satu kemitraan yang mendefinisikan abad ke-21. Presiden Barack Obama menegaskan kembali kemitraan strategis global antara India dan Amerika Serikat.⁴¹ Kerjasama bilateral sekarang bersifat luas dan multi-sektoral, meliputi perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, sains dan teknologi, keamanan *cyber*, teknologi tinggi, energi nuklir sipil, teknologi ruang angkasa dan aplikasi, energi bersih, lingkungan, pertanian dan kesehatan. Interaksi *people-to-people* memberikan vitalitas dan kekuatan lebih lanjut untuk hubungan bilateral. Kerjasama nuklir India dengan AS adalah salah satu produk hubungan kerjasama internasional ini.

D. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran

Pada tahun 1950an, diketahui bahwa dibawah *Program Atoms for Peace*, AS telah mengadakan kerjasama luar negeri dengan Iran untuk program pengadaan nuklir. Kemudian pada tahun 1960, AS memiliki kebijakan luar negeri dengan Iran dimana terjadi perjanjian bilateral yang membolehkan Iran memiliki reaktor nuklir. AS membantu membangun Pusat Penelitian Nuklir Teheran yang dilengkapi dengan lima Megawatt reaktor penelitian nuklir.

³⁹ Squassoni, Sharon, *U.S. Nuclear Cooperation With India: Issues for Congress*, Congressional Research Service, The Library of Congress.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *India-U.S Relations.*

Bahkan ketika melambungnya harga minyak dan terjadi perang Arab-Israel pada tahun 1974, AS mengizinkan Iran untuk memiliki 23 PLTN (Pabrik listrik tenaga nuklir).⁴²

Sebelum kemunduran AS dalam mendukung program Nuklir Iran, salah satu alasan kebijakan AS untuk mendukung program ini adalah hubungan Iran yang sangat dekat dengan Israel, yang mana selanjutnya kemudian membuat Shah direkomendasikan AS untuk menerima dukungan tersebut. Pada tahun 1960 dan 1970an ketika Iran menjadi salah satu penerima tersebar persenjataan AS, Shah dianggap sebagai kandidat yang berhak untuk menerima bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi energi nuklir dan mampu mengurangi penggunaan energi minyak. Pada awal tahun 1970an, AS yang memberikan penawaran kepada Iran untuk melebarkan sayap pada sumber energi lain selain minyak, oleh karena itu Iran membutuhkan tambahan beberapa reaktor nuklir yang memenuhi standar kapasitas listrik untuk pengembangan industrialnya. Perusahaan-perusahaan AS mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membangun reaktor-reaktor tersebut. Singkatnya, sejak akhir 1950an hingga mendekati revolusi Iran Eropa dan pemerintahan AS serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program nuklir Iran selalu membujuk dan membantu Shah dalam membangun program nuklirnya, walaupun Barat sadar, namun karena alasan-alasan politik menolak untuk menyadarinya, bahwa hal ini bisa melangkah ke arah bom atom.⁴³

Pada saat terjadinya perang Iran-Iraq 1980-1988, Iraq menghancurkan reaktor dan pusat penelitian nuklir Iran yang kemudian memaksa Iran setelah perang untuk mencairi bantuan lain demi proyek energi-nuklir. Di bawah kepemimpinan Presiden Hashemi Rafsanjani, pemerintahan Iran mencari bantuan internasional dan kalaborasi dengan fasilitas nuklir negara lain seperti Jerman, Argentina, Spanyol, Republik Ceko, Italia, dan Poland. Namun, usaha-usaha ini dihalangi oleh AS sebagai bagian dari politik *dual-containment*.⁴⁴ Namun beberapa dekade kemudian, AS memutuskan hubungan kerjasama dengan Iran, termasuk semua pengadaan nuklir. Sejak 1979, ketika Pemerintah AS membekukan miliaran dolar dalam aset Iran sebagai tanggapan atas pengambil alihan Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran telah dikenakan berbagai sanksi AS yang membatasi mulai dari perdagangan, investasi, dan bantuan ke Teheran.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Iran telah memiliki hubungan *hostile* dengan Amerika Serikat sejak rezim Pahlevi digulingkan pada tahun 1979. Sejak itu, Republik Islam telah memegang pandangan hampir paranoid dan konspiratif tentang peran dan tindakan AS di Timur Tengah dan telah melihat hampir setiap prakarsa AS sebagai serangan langsung atau tidak langsung terhadap kepentingan nasional Iran. Singkatnya, sejak awal 2000an Iran telah dikepung oleh pasukan AS dari hampir semua arah. Pengepungan ini menyebabkan ketakutan dan kecurigaan Iran terhadap niat Washington terhadap rezim Islam.⁴⁵

AS dan Iran memang memiliki beberapa isu tajam yang sukar diselesaikan, namun yang paling banyak menyita perhatian hingga pemberitaan besar oleh media adalah program nuklir Iran. Hanya dengan tengat waktu yang singkat, Washington menekan Iran untuk meninggalkan fitur-fitur penting untuk program tersebut, seperti pengayaan uranium, yang mana diklaim Washington program tersebut adalah jalan untuk pembuatan senjata nuklir. Nuklir Iran menurut Washington akan memberika Iran kapasitas dan kemampuan untuk

⁴² Alhadar, Smith, *Penyelesaian Damai Nuklir Iran*, Kompas, 14 Oktober 2005.

⁴³ Tarock, Adam, *Iran's Nuclear Programme and The West*, Third World Quarterly, Vol. 27, No. 4, pp 645 – 664, 2006.

⁴⁴ Ozcan, Nihat and Ozdamar Ozgur, *Iran's Nuclear Program And The Future Of U.S.-Iranian Relations*, Middle East Policy, Vol. Xvi, No.1, Spring 2009.

⁴⁵ Bahgat, Gawdat, *Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran*, Blackwell Publishing, International Studies Perspectives (2006) 7, 124–136.

mengancam kepentingan AS dan Barat di wilayah tersebut dan keamanan Global pada umumnya.⁴⁶

Krisis nuklir ini dimulai pada bulan Agustus 2002, ketika kelompok oposisi Iran, Dewan Perlawanan Nasional/*National Council of Resistance* Mujahidin-e Khalq), menuduh Teheran menyembunyikan fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan sebuah pabrik heavy water di Arak. Keberadaan situs-situs tersebut dikonfirmasi oleh foto-foto satelit. Hal ini kemudian diikuti oleh pengumuman Iran dari bahwa program nuklirnya memiliki tujuan damai dan itu akan memungkinkan inspeksi IAEA. Pada November 2003, Iran menghentikan operasi program nuklirnya dan mengumumkan akan memungkinkan adanya inspeksi IAEA yang lebih ketat. IAEA menyimpulkan bahwa tidak ada bukti dari program tersebut, tetapi AS bersikeras bahwa Iran pada bertujuan untuk memproduksi senjata nuklir, khususnya karena negara itu memiliki cadangan bahan bakar fosil yang sangat besar dan tidak memerlukan energi nuklir dalam jangka pendek dan menengah. Sebagai tambahan, tiga faktor lain mendiskreditkan argumen "energi nuklir damai": (1) Iran merahasiakan program nuklirnya sampai ditemukan pada tahun 2002; (2) ada dugaan studi yang berkaitan dengan dan studi-studi persenjataan yang terkait dengan program nuklir serta pengembangan rudal; (3) dan dari perspektif ekonomi, pengayaan tidak logis.⁴⁷

Kebijakan luar negeri AS yang digunakan dalam berhubungan dengan Iran melalui beberapa jalan, namun yang paling sering diperlihatkan yaitu diplomasi, ekonomi, dan psikologi/operasi. AS telah menggunakan diplomasi dan politik untuk mengisolasi Iran sejak krisis dimulai pada tahun 2002 dan akan terus berlanjut untuk melakukannya. Pemerintahan Obama mungkin mencoba untuk mendorong sanksi yang lebih ketat oleh Dewan Keamanan PBB dan melanjutkan bekerja sama dengan lima negara lain yang terlibat dalam perdebatan (Rusia, Cina, Perancis, Inggris dan Jerman). Amerika Serikat telah berkonsentrasi pada Rusia dan Cina untuk hak veto mereka di DK PBB. Tanggapan diplomatik Iran akan terbatas untuk mencoba mencegah konsensus internasional pada program nuklirnya.⁴⁸

Jalan selanjutnya yang juga biasa dipakai untuk menekan negara-negara yang tidak sejalan dengan AS adalah ekonomi. AS telah menggunakan dan akan terus menggunakan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Iran. Tujuannya bukan hanya untuk merusak transaksi internasional Iran, tetapi juga untuk meningkatkan tekanan pada ekonomi domestiknya. Sanksi diperpanjang yang menargetkan seluruh ekonomi Iran mungkin menempatkan rezim Islam dalam posisi yang sulit dengan warganya. Kerusuhan sosial dapat memicu tuntutan politik, terutama dari para mahasiswa muda reformis.⁴⁹

Jalan yang terakhir adalah penggunaan alat-alat psikologis pada mobilisasi publik untuk perubahan politik yang membutuhkan sumber daya yang minimal. Diskusi media dan internet dalam mempertanyakan legitimasi rezim dapat dipertimbangkan. Rezim oposisi Iran sudah menyiarkan pendapat semacam itu. Selain itu, kelompok masyarakat sipil oposisi dapat didukung, seperti yang dilakukan di Ukraina dan Georgia. Contohnya, pada tahun 2003, Kongres AS memberikan \$ 1,5 juta untuk LSM domestik Iran yang bekerja untuk demokrasi dan hak manusia. Kedua, operasi rahasia dan gelap mungkin didukung oleh badan intelijen AS, dengan tujuan untuk mendestabilisasi tatanan domestik dan mempertanyakan legitimasi rezim Islam.⁵⁰

IAEA telah menjelaskan bahwa tidak ada indikasi Iran sedang membuat senjata nuklir⁵¹ dan telah pula dijelaskan oleh Presiden Ahmadinejad di KTT PBB tahun 2005 bahwa Iran tidak

⁴⁶ Ozcan, Nihat and Ozdamar Ozgur, *Iran's Nuclear Program And The Future Of U.S.-Iranian Relations*, Middle East Policy, Vol. Xvi, No.1, Spring 2009.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Alhadar, Smith, *Penyelesaian Damai Krisis Nuklir Iran*, Kompas, 14 Oktober 2005.

akan pernah mengembangkan senjata nuklir⁵² namun AS tetap bersikeras bahwa pengadaan nuklir Iran adalah untuk mengembangkan senjata nuklir. Senator Partai Demokrat pada tahun 2006, Evan Bayh menyatakan bahwa Iran adalah sebuah bangsa yang keras dan telah membuat keputusan strategis untuk memiliki senjata nuklir.⁵³ Argumen AS terhadap program nuklir Iran dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, dengan cadangan hidrokarbon (minyak dan gas alam) Iran yang tidak membutuhkan energi nuklir. Kedua, Iran menggunakan NPT sebagai penutup untuk memperoleh teknologi nuklir dan material dan kemudian menarik diri dari perjanjian pada saat yang dipilihnya sendiri dan kemudian merakit senjata dalam waktu singkat, mirip dengan apa yang dilakukan Korea Utara. Ketiga, Iran tidak bisa dipercaya dengan teknologi untuk memproduksi bahan nuklir.⁵⁴

Sejak 2006, pejabat Departemen Keuangan AS juga memanfaatkan sanksi PBB terhadap Iran untuk meyakinkan lembaga keuangan internasional Eropa dan lembaga lainnya agar tidak membiayai perdagangan dan transaksi dolar dengan Iran. Mereka berpendapat bahwa pembiayaan semacam itu melanggengkan kemampuan Iran untuk mendanai terorisme dan program nuklirnya. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), upaya tersebut telah membuat perdagangan dan pendanaan untuk proyek-proyek energi menjadi lebih sulit didanai di Iran. Departemen Keuangan juga telah memperketat sanksi terhadap bank-bank Iran dengan memblokir mereka dari transfer uang tidak langsung ke dan dari lembaga keuangan Amerika melalui bank di negara lain.⁵⁵

Kecurigaan ini semakin diperkuat oleh pelabelan Iran sebagai anggota poros kejahatan bersama dengan Irak dan Korea Utara, pada tahun 2002. Singkatnya, Iran terletak di lingkungan yang berbahaya. Hubungannya dengan beberapa tetangga belum bersahabat: Teheran memiliki perselisihan teritorial, sektarian, dan ideologis dengan beberapa dari mereka. Selama lebih dari dua dekade Amerika Serikat telah menggunakan berbagai sanksi diplomatik dan ekonomi untuk melemahkan dan mengguncang rezim di Teheran dan sejak awal tahun 2000-an pasukan Amerika telah dikerahkan di negara-negara sekitar Iran. Hubungan dengan Israel, satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah, dicirikan oleh permusuhan bersama. Teheran tidak mengakui negara Israel dan Tel Aviv bersikeras mempertahankan dan mempertahankan monopoli nuklirnya dan haknya untuk secara *pre-emptive* menyerang instalasi nuklir di Iran.⁵⁶

Ringkasnya, Iran masih menjadi anggota NPT walaupun pernah sebelumnya mengancam akan menarik diri dari NPT⁵⁷ dan, berdasarkan ketentuan perjanjian ini, negara-negara anggota memiliki hak untuk mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, termasuk pengayaan uranium. Inilah sebabnya mengapa Iran berulang kali menekankan hal itu, mereka hanya melakukan apa yang boleh mereka lakukan: pengayaan. Namun, kekhawatiran AS, Uni Eropa, dan aktor regional tidak semuanya tanpa dasar. Ketika IAEA telah menegaskan, Iran mempertahankan program pengayaan rahasia selama 18 tahun, sampai ditemukan pada tahun 2002. Meskipun Iran secara kategoris menyangkal tuduhan bahwa programnya adalah untuk memproduksi senjata nuklir, pejabat Iran masih belum mampu meyakinkan pihak lain, terutama AS.⁵⁸

⁵² *Iran Bela Program Nuklir, Kompas*, Senin 19 September 2005.

⁵³ MUN, *AS Didesak Kontak Langsung Iran, Kompas*, 18 April 2006.

⁵⁴ Bahgat, Gawdat, *Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran*, Blackwell Publishing, International Studies Perspectives, 2006, hlm 7, 124–136.

⁵⁵ PAAIA (Public Affairs Alliance of Iranian Americans), *Report in Iran Sanctions Legislation in the 112th Congress*, PAAIA Public Policy Center 2012.

⁵⁶ Bahgat, Gawdat, *Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran*, Blackwell Publishing, International Studies Perspectives 2006, hlm 7, 124–136.

⁵⁷ Reuters, *Rakyat AS Tak Yakini Bush Mampu Tangani Iran*, Sengketa Nuklir, Kompas, Rabu 15 Februari 2006.

⁵⁸ Ozcan, Nihat and Ozdamar Ozgur, *Iran's Nuclear Program And The Future Of U.S.-Iranian Relations*, Middle East Policy, Vol. Xvi, No.1, Spring 2009.

